

Partisipasi Politik Non-Konvensional Komunitas Punk: Studi Fenomenologis di Kota Bandung

Iis Masitoh ^{a,1*}, Cecep Darmawan ^{a,2}, Leni Anggraeni ^{a,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ Iismasitoh@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2025;

Revised: 28 Juli 2025;

Accepted: 4 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Fenomenologi;

Komunitas Punk;

Partisipasi Politik Non-Konvensional;

Kritik Pemerintahan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi partisipasi politik non-konvensional komunitas punk dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di Kota Bandung, mengisi kesenjangan kajian tentang ekspresi politik dari kelompok marjinal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik Max van Manen. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh partisipan yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam aktivitas komunitas, observasi partisipatif, dan dokumentasi artefak kultural. Temuan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik komunitas punk mencakup seni jalanan, musik punk, penerbitan zine, serta aksi kolektif di ruang publik sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Partisipasi ini dilatarbelakangi oleh kesadaran politik kritis dan pengalaman marginalisasi sosial, meskipun menghadapi hambatan berupa stigmatisasi publik dan terbatasnya ruang ekspresi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa bentuk partisipasi non-konvensional komunitas punk memuat nilai-nilai demokrasi partisipatif yang signifikan dan penting untuk diakomodasi dalam kebijakan publik serta pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Keterbatasan studi ini terletak pada fokus geografis yang sempit dan jumlah partisipan yang terbatas, sehingga generalisasi temuan bersifat kontekstual.

ABSTRACT

Keywords:

Phenomenology;

Punk Community;

Non-Conventional Political Participation;

Government Criticism.

Non-Conventional Political Participation among Punk Communities: A Phenomenological Study in Bandung, Indonesia. This study aims to explore the non-conventional political participation of the punk community in voicing criticism of government policies in Bandung, addressing a gap in the literature on political expression among marginalized groups. A qualitative approach was employed, using Max van Manen's hermeneutic phenomenology as the guiding method. Data were collected through in-depth interviews with seven participants selected based on their active involvement in community activities, participatory observation, and documentation of cultural artifacts. The findings indicate that the forms of political participation within the punk community include street art, punk music, zine publishing, and collective actions in public spaces, serving as channels to express dissent toward policies perceived as unjust. This participation is rooted in critical political awareness and experiences of social marginalization, yet it faces challenges such as public stigmatization and limited expressive spaces. The study suggests that these non-conventional forms of participation embody significant democratic values and should be accommodated within inclusive public policy and citizenship education frameworks. The study's limitations lie in its narrow geographic focus and limited number of participants, rendering the findings context-specific.

Copyright © 2025 (Iis Masitoh, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Masitoh, I., Darmawan, C. ., & Anggraeni, L. (2025). Partisipasi Politik Non-Konvensional Komunitas Punk: Studi Fenomenologis di Kota Bandung . *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 53–61. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v5i2.3547>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Partisipasi politik non-konvensional telah menjadi perhatian dalam kajian politik kontemporer, terutama ketika kelompok-kelompok subkultur dan warga negara muda menunjukkan ketidakpuasan terhadap institusi politik formal. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, gerakan punk telah menjadi saluran ekspresi politik alternatif melalui musik, seni jalanan, dan aksi kolektif (Hill, 2024; Prinz, 2014). Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik tidak selalu terwujud melalui jalur formal seperti pemilu atau partai politik, melainkan juga melalui praktik budaya yang memuat pesan-pesan perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan otoritarianisme (Xiao & Donaghey, 2022). Dalam konteks ini, partisipasi politik non-konvensional menjadi bentuk kritik terhadap sistem representatif yang dianggap tidak responsif terhadap suara kelompok marginal. Artikulasi politik melalui subkultur ini memperluas definisi kewarganegaraan dari yang semata institusional menjadi juga ekspresif dan performatif (Bernhardt & Schwiertz, 2025).

Di Indonesia, partisipasi politik masih sangat terpusat pada mekanisme formal dan aktor-aktor arus utama seperti partai politik, pejabat publik, serta organisasi kemasyarakatan yang dilembagakan. Namun, terdapat juga praktik-praktik politik non-konvensional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil termasuk komunitas marginal seperti komunitas punk. Remaja di Indonesia sendiri melihat komunitas Punk sebagai ruang ekspresi alternatif yang tidak ditemukan dalam sistem pendidikan formal maupun institusi politik arus utama (Zulkarnain, 2017) sedangkan masyarakat yang lain melihat komunitas punk dengan penuh stigma seperti kelompok menyimpang atau perusak ketertiban (Nabila, 2022), sehingga aspirasi politik mereka jarang diakomodasi dalam diskursus resmi kenegaraan. Sebagai contoh misalnya laporan Tribun (2023) mencatat bahwa komunitas punk sangat aktif dalam memprotes berbagai macam konflik-konflik agraria seperti penggusuran serta aktif dalam menyuarakan kebijakan yang dinilai bermasalah, namun seringkali mendapat represifitas dari aparat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi menjanjikan partisipasi semua warga, dalam praktiknya, tidak semua suara mendapat perlakuan yang setara.

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana komunitas punk di Kota Bandung berpartisipasi dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dinilai bermasalah melalui bentuk-bentuk politik non-konvensional, serta bagaimana partisipasi tersebut dipahami dan dimaknai oleh anggota komunitas dan masyarakat luas. Komunitas punk tidak hadir sebagai entitas pasif, melainkan sebagai aktor politik yang aktif membangun narasi tandingan terhadap hegemoni negara melalui praktik budaya dan aksi kolektif. Mereka menyuarakan kritik terhadap ketimpangan, korupsi, serta represifitas negara melalui berbagai medium seperti musik DIY (*do it yourself*), zine, aksi jalanan, hingga kegiatan solidaritas sosial seperti *Food Not Bombs*. Namun keberadaan serta ekspresi mereka sering kali direduksi, dianggap menyimpang serta dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan sosial masyarakat (Chotim & Latifah, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami partisipasi politik komunitas punk sebagai praktik politik yang otonom dan bermakna.

Studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi punk sebagai subkultur yang memiliki dimensi politik kuat. Baron, (1989) beserta Hebdige (1979) melihat punk sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap struktur sosial dominan. Sharp & Threadgold (2019) menyebutkan bahwa gerakan punk sering mengartikulasikan politik alternatif yang menentang kapitalisme, patriarki, dan otoritarianisme. Di Indonesia, penelitian Budiningsih & Setiawan (2015) dan Arief (2014) telah mengkaji aspek sosiologis komunitas punk, namun sebagian besar masih terbatas pada identitas, gaya hidup, atau bentuk-bentuk partisipasi politik secara deskriptif. Studi Iverson (2020) menjadi pengecualian penting dengan mengeksplorasi praktik kolektif DIY komunitas punk di Bandung. Namun demikian, kajian yang mengaitkan partisipasi politik komunitas punk dengan konsep kewarganegaraan kritis dan makna subjektif tindakan politik mereka masih sangat jarang dijumpai, terutama dalam konteks Indonesia.

Walaupun terdapat berbagai penelitian tentang komunitas punk, kebanyakan belum secara eksplisit mengkaji partisipasi politik mereka dalam kerangka kritik sosial terhadap pemerintah, apalagi

dengan pendekatan fenomenologi yang mendalami pengalaman subjektif mereka. Penelitian yang ada umumnya tidak menyoroti bagaimana komunitas ini memaknai tindakan politik mereka sebagai bagian dari kewarganegaraan yang aktif dan reflektif. Selain itu, minimnya kajian yang mengaitkan antara praktik budaya tandingan dan ekspresi politik marjinal di Indonesia mengakibatkan representasi komunitas punk dalam studi kewarganegaraan masih timpang. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana warga negara dari kelompok subkultur mempraktikkan bentuk partisipasi politik yang tidak konvensional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang partisipasi politik dengan memasukkan ekspresi budaya subkultur sebagai bagian integral dari tindakan politik warga negara. Temuan ini menantang dikotomi klasik antara politik formal dan non-formal dengan menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik dapat dimediasi melalui medium budaya yang kerap diabaikan dalam literatur politik arus utama. Dengan menyoroti praktik politik komunitas punk yang berbasis pada seni, musik, dan literasi alternatif, penelitian ini menambahkan perspektif baru dalam kajian partisipasi politik non-konvensional. Selain itu, kontribusi teoritik lain terletak pada penguatan kerangka kewarganegaraan kritis, yaitu bagaimana warga negara terutama dari kelompok marjinal mengartikulasikan hak dan tanggung jawab mereka melalui praktik budaya yang bersifat reflektif, resistif, dan kreatif terhadap kondisi sosial-politik yang mereka hadapi.

Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemangku kebijakan, pendidik, serta aktivis masyarakat sipil tentang pentingnya merancang kebijakan dan pendidikan kewarganegaraan yang lebih inklusif terhadap bentuk-bentuk partisipasi alternatif dari kelompok marginal. Bentuk ekspresi politik komunitas punk, seperti seni jalanan dan produksi zine, menunjukkan bahwa ada kanal-kanal artikulasi kepedulian politik yang tidak termuat dalam struktur institusional formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya afirmatif dari negara dan institusi pendidikan untuk mengenali, memfasilitasi, dan tidak meminggirkan bentuk partisipasi yang tidak konvensional ini. Pengakuan atas keragaman ekspresi warga negara dapat memperkuat kualitas demokrasi partisipatif serta memperluas cakrawala pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual, kritis dan berbasis pengalaman hidup warga.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional yang dijalankan oleh komunitas punk di Kota Bandung dalam mengkritik kebijakan pemerintahan; (2) bagaimana makna subjektif dari partisipasi tersebut dipahami oleh anggota komunitas; dan (3) tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam mengekspresikan kritik sosial-politik. Melalui pendekatan fenomenologi hermeneutik, penelitian ini berupaya menafsirkan dimensi pengalaman politik dari perspektif anggota komunitas itu sendiri, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan wacana kewarganegaraan yang lebih demokratis, reflektif, dan inklusif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik Van Manen dengan jenis penelitian kualitatif untuk memahami makna subjektif partisipasi politik komunitas punk di Kota Bandung. Partisipan penelitian terdiri dari tujuh anggota aktif komunitas punk yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang menyuarakan kritik sosial-politik, dengan kriteria keterlibatan minimal dua tahun dan kesediaan berpartisipasi dalam wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif dalam kegiatan komunitas seperti pertunjukan musik, aksi kolektif, serta dokumentasi artefak budaya seperti zine, poster, dan rekaman musik. Proses analisis dilakukan secara tematik dengan langkah-langkah membaca berulang, pengkodean manual terhadap transkrip wawancara dan catatan lapangan, identifikasi tema sentral, dan refleksi hermeneutik atas makna pengalaman partisipan. Validitas dan ketepatan interpretasi dikonfirmasi melalui triangulasi sumber data serta proses member-checking

dengan beberapa partisipan kunci guna memastikan koherensi makna dan mempertajam pemahaman atas fenomena yang diteliti.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi politik komunitas punk di Kota Bandung diwujudkan dalam bentuk-bentuk non-konvensional yang sarat makna eksistensial. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap tujuh partisipan aktif, ditemukan bahwa komunitas ini mengekspresikan aspirasi politik mereka melalui musik seperti lagu-lagu yang memuat banyak lirik kritik atas pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya, seni jalanan seperti graffiti dan mural, produksi zine, dan aksi kolektif yang bersifat otonom seperti aksi protes pasar gratis. Para partisipan menyatakan bahwa saluran politik formal seperti pemilu dan partai politik tidak mampu menampung suara mereka karena dinilai kaku, birokratis, dan mengabaikan kelompok marginal. Sebaliknya, mereka lebih memilih menggunakan medium budaya sebagai alat artikulasi politik yang menggabungkan ekspresi identitas, kritik sosial, dan solidaritas kolektif.

Musik punk menjadi sarana utama dalam menyampaikan protes terhadap situasi sosial-politik yang dianggap tidak adil. Lagu-lagu serta konser musik yang mereka ciptakan memuat kritik tajam terhadap pemerintahan dan kebijakannya, sistem ekonomi kapitalistik, serta praktik diskriminatif aparat negara. Seorang partisipan menyatakan, "Kami tidak percaya pada sistem, Pemerintah banyak ngerugiin rakyat kecil setiap bikin kebijakan makanya kita bikin lagu buat ngungkapin keresahan kita. Dengan lagu semoga kita dilihat dan didengar". Musik bagi komunitas punk bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi wahana artikulasi pengalaman dan aspirasi yang sulit disalurkan melalui kanal formal. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Van Manen sebagai *lived experience*, yaitu pengalaman hidup yang sarat makna dan membentuk pemahaman eksistensial subjek terhadap dunianya (Barrell, 1993).

Selain musik, seni jalanan seperti mural dan grafiti menjadi sarana *reclaiming space*, yaitu upaya merebut kembali ruang publik dari dominasi negara dan pasar. Observasi menunjukkan bahwa beberapa dinding kota diwarnai dengan pesan-pesan visual yang mengandung kritik terhadap represi, ketimpangan sosial, perusakan lingkungan dan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan. Karya-karya ini menjadi bentuk komunikasi politik yang partisipatif dan mengundang publik untuk terlibat dalam diskursus alternatif. Sejalan dengan wawasan Lefebvre bahwa ruang publik merupakan hasil produksi sosial yang sarat konflik makna, Zieleniec (2018) dalam artikelnya *Lefebvre's Politics of Space: Planning the Urban as Oeuvre* menekankan adanya *politics of space* sebagai medan perjuangan simbolik dan estetis antara neraca kekuasaan kapital dan kreativitas masyarakat. Ruang publik tidak netral, melainkan diciptakan oleh dan untuk bermakna. Dalam hal ini, komunitas punk Bandung menggunakan seni jalanan seperti mural, grafiti, zine, serta instalasi *Do It Yourself* (DIY) untuk mendirikan *counter space* yaitu produksi makna tandingan yang menentang narasi hegemonik dan menghidupkan kewarganegaraan ekspresif di ruang publik.

Zine merupakan media cetak independen yang berfungsi sebagai kanal diseminasi ideologi dan narasi alternatif. Produksi zine dilakukan secara kolektif dengan prinsip *do-it-yourself* (DIY), tanpa intervensi dari lembaga resmi atau sponsor komersial. Salah satu partisipan menyatakan, "Zine itu suara kita yang nggak bisa masuk koran atau TV". Zine memungkinkan mereka membentuk ruang wacana yang otonom, sesuai dengan konsep *alternative public sphere* dari Habermas dimana diskursus politik bisa berlangsung lebih inklusif, bebas, dan tak terikat kepentingan institusional (Fiig, 2011).

Temuan juga menunjukkan pentingnya solidaritas sebagai fondasi partisipasi politik komunitas punk. Solidaritas ini bukan hanya ikatan emosional, melainkan strategi bertahan di tengah represi dan marjinalisasi. Aktivitas kolektif seperti aksi pasar gratis Bandung menjadi bukti konkret solidaritas yang berwujud dalam ruang-ruang alternatif. Melucci menyebut solidaritas sebagai sumber daya simbolik dan struktural dalam gerakan sosial baru, yang memungkinkan terbentuknya identitas kolektif sebagai kekuatan politik (Ferrari, 2022).

Namun, komunitas ini juga menghadapi hambatan serius, terutama represi dari aparat dan stigmatisasi dari masyarakat. Beberapa kegiatan mereka dibubarkan, bahkan dilarang menggunakan ruang publik. Tilly & Tarrow (2007) menjelaskan bahwa politik kontestasi selalu melibatkan hubungan kuasa yang tidak setara, di mana aktor non-negara seperti komunitas punk sering diperlakukan sebagai ancaman. Dalam konteks ini, tindakan represif justru mendorong mereka untuk semakin kreatif dan taktis dalam membangun ruang politik alternatif.

Tabel 1. Temuan Bentuk Partisipasi Politik Komunitas Punk

| Bentuk Partisipasi Politik | Uraian Singkat |
|--------------------------------|--|
| Musik Punk | Ekspresi kritik terhadap kondisi sosial dan politik pemerintahan lewat lirik lagu dan pertunjukan musik. |
| Seni Jalanan (Mural, Grafiti) | Media visual untuk menyuarakan perlawanan dan identitas |
| Zine | Media cetak alternatif untuk diskusi dan penyebaran wacana |
| Aksi Kolektif dan Ruang Otonom | Pertemuan, diskusi, dan aksi di ruang publik alternatif. |

Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi politik tidak selalu terwujud dalam bentuk formal seperti pemilu atau partisipasi dalam lembaga perwakilan. Komunitas punk menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi alternatif yang berakar pada ekspresi budaya dapat menjadi sarana efektif untuk menyuarakan kepentingan politik serta kritik atas pemerintah dan kebijakannya. Dalam praktiknya, komunitas punk memanfaatkan simbol visual dan karya musik sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dihasilkan oleh sistem yang dianggap otoriter (Fajri, 2020). Melalui mural, grafiti, zine, hingga pertunjukan musik mereka menegaskan bahwa ekspresi budaya dapat menjadi medium artikulasi politik yang kuat dan bermakna.

Hal ini sejalan dengan Dalton (2013) yang menyatakan bahwa generasi pasca-industri cenderung memilih partisipasi berbasis nilai (*value-driven participation*), bukan lewat institusi formal, melainkan melalui bentuk-bentuk partisipasi yang menegaskan nilai-nilai moral, identitas dan solidaritas sosial (Copeland, 2013). Partisipasi politik komunitas punk juga memperluas batas konseptual partisipasi politik itu sendiri. Hal ini memperkuat literatur tentang *unconventional political participation* yang dipelopori oleh Barnes & Kaase yakni termasuk partisipasi protes, mural dan aksi nonformal lainnya sebagai bentuk respons terhadap eksklusi politik formal serta dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap proses politik institusional (Pitti dkk., 2021; Stockemer, 2014). Bentuk partisipasi ini bersifat ekspresif dan simbolik, tidak sekadar menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga mengekspresikan posisi politik dan kritik moral terhadap sistem yang dominan.

Praktik Do It Yourself melalui musik, mural, zine, dan aksi kolektif dalam komunitas punk merepresentasikan medium budaya sebagai ruang politik alternatif di luar struktur formal. Bahkan, musik punk menjadi medium utama dalam menolak struktur kekuasaan dan kebijakan represif negara. (Septiyan, 2024) mempertegas bahwa ekspresi artistik subkultur bisa menjadi alat kritik politik yang langsung dan tajam. Dalam konteks ini, zine sebagai media alternatif menawarkan narasi tandingan terhadap media arus utama dan menjadi alat penting dalam mengartikulasikan identitas serta perlawanan terhadap hegemoni kebijakan negara (Kusuma dkk., 2022). Produksi zine tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai praktik politik mikro yang membangun kesadaran kolektif, memperluas jaringan solidaritas, dan mempertanyakan narasi resmi yang dominan dalam kebijakan publik.

Dalam kerangka teori kewarganegaraan kritis (*critical citizenship*), partisipasi politik tidak dibatasi pada keterlibatan formal dalam institusi negara, tetapi meliputi tindakan reflektif, resistif dan transformatif yang dilakukan warga negara dalam konteks sosial yang tidak setara. Komunitas punk di Bandung merepresentasikan bentuk kewarganegaraan yang bersifat emansipatoris, di mana ekspresi budaya seperti musik, zine, mural dan aksi kolektif menjadi medium artikulasi hak, kritik dan

solidaritas. Hal ini sejalan dengan gagasan Johnson & Morris (2010) bahwa kewarganegaraan kritis “menuntut warga untuk berpikir secara mendalam tentang keadilan sosial, bertindak berdasarkan nilai-nilai moral, dan menantang struktur dominasi yang ada” (*critical citizenship requires people to think deeply about social justice, act upon moral values, and challenge existing power structures*, hlm. 83). Komunitas punk tidak hanya menuntut ruang, tetapi juga mereproduksi klaim simbolik melalui praktik budaya citra kewarganegaraan dari bawah (*citizenship from below*) (Isin, 2009).

Fathmawati & Adi (2023) menemukan bahwa punk di Indonesia melakukan resistensi budaya melalui proses adaptasi elemen global secara kritis, menciptakan identitas lokal-politik yang resistif terhadap dominasi budaya asing. Selain itu, Zaenal (2025) menyampaikan bahwa komunitas punk menjalankan aksi lingkungan sebagai bentuk partisipasi warga yang transformatif, menunjukkan keterlibatan sosial yang berakar pada praktik solidaritas dan keadilan ekologis. Sementara itu, Pambudi dkk. (2023) mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap komunitas punk terutama dari sisi sosial sering dipandang negatif karena perbedaan gaya hidup mereka, tetapi persepsi tersebut sebenarnya mencerminkan konflik simbolik dan upaya artikulasi identitas yang kritis terhadap norma dominan. Ketiga temuan ini mengilustrasikan bahwa komunitas punk memanifestasikan praktik kewarganegaraan kritis melalui medium budaya, yang tidak hanya merefleksikan resistensi terhadap struktur dominan, tetapi juga membentuk ruang artikulasi politik yang bersifat transformatif dan emansipatoris

Dari sudut pandang fenomenologis, pengalaman anggota komunitas punk merupakan bentuk resistensi eksistensial terhadap struktur sosial-politik yang menindas. Musik, mural, zine, dan ruang kolektif tidak hanya menjadi sarana ekspresi, melainkan juga arena pembentukan makna yang memperkuat identitas politik mereka. Pendekatan fenomenologi hermeneutik menekankan pentingnya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) sebagai jalan menuju esensi makna yang tersembunyi dalam tindakan keseharian (Manen, 1990). Dalam konteks ini, medium budaya seperti musik punk, zine dan mural yang diproduksi komunitas punk Bandung bukan hanya bentuk ekspresi estetis, melainkan juga artikulasi eksistensial yang merefleksikan relasi mereka dengan kekuasaan dan ketidakadilan struktural.

Sebagaimana temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa artefak budaya seperti zine yang berisi kritik atas penggusuran di Kebon Jeruk dan Dago Elos dan musik bertema kritik atas kebijakan pemerintah bukan sekadar komunikasi simbolik, tetapi menjadi medium reflektif tempat komunitas merumuskan pengalaman hidup secara kritis. Misalnya, salah satu partisipan menyebut zine sebagai “cara kami menjelaskan apa yang kami alami, tapi gak akan dimuat di berita.” Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi tersebut berakar pada pengalaman afektif yang intens seperti marah, kecewa atau frustrasi yang ditransformasikan menjadi makna kolektif. Lilja & Vinthagen (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Sovereign power, disciplinary power and biopower: resisting what power with what resistance?* menegaskan bahwa kekuasaan selalu diiringi dengan resistensi dimana perlawanan merupakan sebuah reaksi atas kekuasaan dan dalam kasus komunitas punk, resistensi itu bersifat mikro, tersebar, dan simbolik.

Sejalan dengan itu Argo dkk. (2014) dalam studi fenomenologis terhadap eks-punkers menunjukkan bahwa keterlibatan dalam komunitas punk menjadi titik pijak terbentuknya makna hidup yang baru, yakni identitas yang dibangun dari pengalaman resistensi terhadap struktur sosial yang eksklusif dan represif. Sementara itu, Sujoko & Khasan (2022) mencatat bahwa kebermaknaan hidup dalam kalangan punkers tumbuh dari proses pemaknaan terhadap pilihan hidup non-konvensional yang sarat penolakan terhadap nilai-nilai dominan masyarakat arus utama, sekaligus sebagai bentuk aktualisasi eksistensial yang otentik. Fitria & Putra (2021) juga menemukan bahwa keterlibatan remaja dalam komunitas punk berkaitan erat dengan upaya melawan tekanan sosial dan membangun ruang ekspresi alternatif untuk memulihkan agensi personal yang teralienasi dalam sistem sosial yang homogen dan normatif. Hal ini memperkuat temuan bahwa komunitas punk tidak sekadar menentang dominasi sistem yang menindas, tetapi membangun praktik politik reflektif melalui medium budaya

yang mendalam dan transformasional. Dalam bingkai fenomenologis, tindakan mereka bukanlah sekadar protes, melainkan sebuah bentuk artikulasi eksistensial untuk mengklaim ruang, identitas dan masa depan alternatif di tengah represi struktural yang membungkam suara-suara pinggiran.

Penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang demokrasi sebagai proses yang tidak terbatas pada prosedur formal, tetapi juga mencakup ekspresi kultural dan perjuangan simbolik dalam ruang publik alternatif. Temuan ini mendorong perlunya kebijakan yang lebih inklusif yang mengakui bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional sebagai bagian sah dari praktik demokrasi. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menciptakan ruang dialog yang lebih fleksibel serta mendukung keberadaan ruang otonom sebagai arena partisipasi politik yang sah dan produktif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus geografis yang terbatas pada komunitas punk di Bandung, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke komunitas punk di kota lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, pendekatan fenomenologi hermeneutik yang digunakan lebih menekankan pada makna subjektif, sehingga tidak menangkap dinamika struktural atau kuantitatif secara luas. Studi lanjutan dapat mengkaji dinamika serupa di kota lain atau melakukan perbandingan antar subkultur untuk memperkaya pemahaman tentang partisipasi politik non-konvensional dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas punk di Kota Bandung tidak hanya merupakan sebuah sub-kultur tetapi juga aktor politik yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan melalui partisipasi politik non-konvensional. Kritik tersebut diwujudkan dalam medium budaya seperti musik punk, seni jalanan, dan produksi zine, serta aksi kolektif yang menjadi sarana artikulasi aspirasi, protes sosial, dan pembentukan solidaritas. Praktik ini tidak sekadar simbolik, tetapi merefleksikan nilai-nilai perlawanan, emansipasi, dan resistensi terhadap dominasi negara dan kapitalisme. Temuan ini memperluas pemahaman tentang partisipasi politik dengan menekankan pentingnya dimensi afektif, simbolik, dan eksistensial dalam praktik politik kelompok marginal yang kerap tidak tercakup dalam paradigma partisipasi formal. Secara teoretis, studi ini mengintegrasikan pendekatan fenomenologi hermeneutik van Manen dengan teori partisipasi politik non-konvensional dan teori kewarganegaraan kritis, memberikan kontribusi metodologis dan konseptual dalam studi politik yang dijalankan oleh kelompok-kelompok marjinal. Kebaruan penelitian terletak pada eksplorasi mendalam terhadap makna subjektif dan pengalaman hidup pelaku politik non-formal dalam komunitas punk, yang selama ini belum banyak dikaji dalam konteks Indonesia. Studi ini membuka ruang bagi pemahaman demokrasi yang lebih luas, di mana medium budaya dan praktik keseharian menjadi instrumen sah dalam partisipasi politik. Implikasi praktis dari penelitian ini penting untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap bentuk partisipasi alternatif. Negara dan pemerintah daerah didorong untuk mengakui serta menyediakan ruang legal dan aman bagi ekspresi politik kaum marjinal. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kurikulum perlu memasukkan studi kritis tentang bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional agar siswa dapat memahami keragaman ekspresi politik di masyarakat dan mengembangkan kesadaran kewargaan yang reflektif dan empatik. Penelitian lanjutan disarankan mengadopsi pendekatan komparatif lintas kota dan geografis untuk mengeksplorasi varian pola perlawanan komunitas punk dalam konteks lokal yang berbeda. Kajian terhadap dinamika internal komunitas, seperti transformasi strategi resistensi, konflik nilai dan relasi antargenerasi juga penting dilakukan. Pendekatan fenomenologis tetap relevan, namun dapat diperkuat dengan etnografi atau studi visual guna menangkap praksis politik keseharian secara lebih holistik.

Referensi

Argo, A. R. B., Karyono, K., & Kristiana, I. F. (2014). Kebermaknaan hidup mantan punkers. *Jurnal Psikologi*, 13(1), 93–101. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.1.93-101>

- Argus, A. A. (2023, September 21). Komunitas Punk Peduli Rempang, Jovan: Kedaulatan ini bukan milik investor. *Tribun Medan*. <https://medan.tribunnews.com/2023/09/21/komunitas-punk-peduli-rempang-jovan-kedaulatan-ini-bukan-milik-investor>
- Arief, R. P. (2014). *Komunitas punk dan politik (Studi terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik komunitas punk di Kota Padang)* [Skripsi, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10766>
- Baron, S. W. (1989). Resistance and its consequences: The street culture of punks. *Youth & Society*, 21(2), 207–237. <https://doi.org/10.1177/0044118X89021002005>
- Barrell, B. (1993). Researching lived experiences: Human science for an action sensitive pedagogy (Max van Manen). *Paideusis*, 7(1), 47–49. <https://doi.org/10.7202/1073288ar>
- Bernhardt, F., & Schwiertz, H. (2025). Enacting tenant citizenship and struggles for the right to home: Linking activist, active, and community citizenship. *Citizenship Studies*, 29(1–2), 41–56. <https://doi.org/10.1080/13621025.2025.2470742>
- Budiningsih, T. E., & Setiawan, D. (2015). Gaya hidup punklung (studi kasus pada komunitas punklung di Cicalengka, Bandung). *Jurnal Psikologi Talenta*, 1(1). <https://doi.org/10.26858/talenta.v1i1.5224>
- Chotim, E. R., & Latifah, S. U. (2018). Komunitas anak punk dan anomali sosial (studi kasus di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 69–93. <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2772>
- Copeland, L. (2013). Value change and political action: Postmaterialism, political consumerism, and political participation. *American Politics Research*, 42(2), 257–282. <https://doi.org/10.1177/1532673X13494235>
- Dalton, R. J. (2013). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies* (6th ed.). CQ Press.
- Fajri, N. C. (2020). Perlawanan positif komunitas punk Endang Soekamti. *Jurnal Pamator*, 13(1), 57–63. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6951>
- Fathmawati, Y. D., & Adi, I. R. (2023). American influence through youth culture: Representation analysis on punk subculture in Indonesia. *Rubikon: Journal of Transnational American Studies*, 10(1), 12–31. <https://doi.org/10.22146/rubikon.v10i1.74853>
- Ferrari, E. (2022). Latency and crisis: Mutual aid activism in the COVID-19 pandemic. *Qualitative Sociology*, 45, 413–431. <https://doi.org/10.1007/s11133-022-09513-7>
- Fiig, C. (2011). A powerful, opinion-forming public? Rethinking the Habermasian public sphere in a perspective of feminist theory and citizenship. *Distinktion: Journal of Social Theory*, 12(31), 291–308. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2011.621049>
- Fitria, Y. M., & Putra, E. V. (2021). Potret sosial komunitas anak punk di Kota Perawang, Provinsi Riau. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(1), 91–100. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i1.406>
- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The meaning of style*. Routledge.
- Hill, H. (2024). Punk music and cinnamon buns: From everyday resistance to contentious politics in a 1980s Swedish autonomous center. *Journal of Political Ideologies*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2369308>
- Isin, E. F. (2009). Citizenship in flux: The figure of the activist citizen. *Subjectivity*, 29, 367–388. <https://doi.org/10.1057/sub.2009.25>
- Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *The Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <https://doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Kusuma, K. B., Yulianto, V. I., & Marianto, M. D. (2022). Media alternatif seni dan konstruksi identitas: Studi kasus zine Black Metal Istiqomah. *Jurnal Kajian Seni*, 8(2), 167–177. <https://doi.org/10.22146/jksks.65009>

- Lilja, M., & Vinthagen, S. (2014). Sovereign power, disciplinary power and biopower: Resisting what power with what resistance? *Journal of Political Power*, 7(1), 107–126. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2014.889403>
- Manen, M. van. (1990). *Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy*. State University of New York Press.
- Martin-Iverson, S. (2020). The value of the underground: Punk, politics, and creative urbanism in Bandung, Indonesia. *Cultural Studies*, 35(1), 110–135. <https://doi.org/10.1080/09502386.2020.1844261>
- Nabila, N. H. P. (2022). Problematika stigma buruk dan intoleransi anak “punk.” *Jurnal Kommunity Online*, 3(2), 165–176. <https://doi.org/10.15408/jko.v3i2.30992>
- Pambudi, G. A., Hayat, N., & Widiensyah, S. (2023). Persepsi masyarakat terhadap eksistensi komunitas subkultur punk ditinjau dari aspek sosial (studi kasus di Kecamatan Cisoka). *ES: Jurnal Sosial*, 7(1), 101–115. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1789>
- Pitti, I., Mengilli, Y., & Walther, A. (2021). Liminal participation: Young people’s practices in the public sphere between exclusion, claims of belonging, and democratic innovation. *Youth & Society*, 55(1), 143–162. <https://doi.org/10.1177/0044118X211040848>
- Prinz, J. (2014). The aesthetics of punk rock. *Philosophy Compass*, 9(9), 583–593. <https://doi.org/10.1111/phc3.12145>
- Septiyan, D. D. (2024). Ideologi anarkisme dalam musik punk: Studi terhadap band Bunga Hitam. *MATRA: Jurnal Musik Tari Teater & Rupa*, 3(2), 100–110. <https://doi.org/10.30870/m.v3i2.30059>
- Sharp, M., & Threadgold, S. (2019). Defiance labour and reflexive complicity: Illusio and gendered marginalisation in DIY punk scenes. *The Sociological Review*, 68(3), 606–622. <https://doi.org/10.1177/0038026119875325>
- Stockemer, D. (2014). What drives unconventional political participation? A two-level study. *The Social Science Journal*, 51(2), 201–211. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.012>
- Sujoko, & Khasan, M. (2022). Kebermaknaan hidup pada punkers di Surakarta. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/intuisi.v9i2.11605>
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2007). *Contentious politics*. Paradigm Publishers.
- Xiao, J., & Donaghey, J. (2022). Punk activism and its repression in China and Indonesia: Decolonizing “global punk.” *Cultural Critique*, 116, 28–63. <https://doi.org/10.1353/cul.2022.0036>
- Zaenal, M. (2025). Transformasi identitas sosial komunitas punk Sorak dalam kontribusinya terhadap gerakan lingkungan berkelanjutan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 6(1), 19–26. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v6i1.362>
- Zieleniec, A. (2018). Lefebvre’s politics of space: Planning the urban as oeuvre. *Urban Planning*, 3(3), 5–15. <https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1343>
- Zulkarnain, I. (2017). Ketertarikan remaja terhadap komunitas punk di Kota Magelang. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(4). <https://doi.org/10.21831/e-societas.v6i4.9106>